



**RANCANGAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN**
JL. A. WAHAB SYAHRANIE NO. 16 KOTAK POS NO. 1064 TELP. 0541-743908 FAX. 743810
SAMARINDA
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan bimbingan serta atas perkenan-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat terselesaikan tepat waktu atas kerja sama dengan pihak terkait di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD periode 2019 – 2023 yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kalimantan Timur yang merata dan berkeadilan. Sehingga proses perencanaan program pembangunan kesehatan terpadu khususnya di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan untuk mencapai hal tersebut.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 diharapkan dapat memberikan tuntunan kepada kita untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di bidang kesehatan secara terpadu sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 . Perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dapat berjalan baik jika secara terpadu dan saling sinergi dalam pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dan semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dapat bermanfaat dan memberikan tuntunan dalam proses penyusunan perencanaan dibidang kesehatan.

Samarinda, 14 Maret 2022



KEPALA DINAS KESEHATAN

itah, SKM, MOIH
mbina Tingkat I

IP. 19690129 199302 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	4
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN.....	8
1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan	8
2. Analisis Kinerja Pelayanan	25
3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi	52
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	58
5. Penelaahan usulan program kegiatan.....	74
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	80
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	80
2. Tujuan dan Sasaran.....	83
3. Program dan Kegiatan.....	85
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	96
1. Pagu APBD Tahun 2022.....	96
BAB V PENUTUP.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Diterapkannya otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah membawa banyak perubahan sistem dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan di Provinsi. Prinsip dasar desentralisasi adalah setiap daerah memiliki kewenangan (administrative, keuangan dan bahkan politik) yang cukup besar untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan daerahnya. Desentralisasi merubah sistem yang semula sentralistik sehingga dengan desentralisasi diharapkan akan membawa perubahan peran pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan. Namun kewenangan pembangunan yang dapat dijalankan tersebut harus tetap sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada setiap daerah, untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

Program-program pembangunan yang disusun secara keseluruhan dirangkum dalam satu bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja merupakan sebuah proses dalam mencapai tujuan pembangunan dalam kurun waktu jangka pendek (1 tahun). Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada prinsipnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan telah menyusun suatu rencana strategis di bidang kesehatan sebagai kerangka perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Provinsi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional dan daerah melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2021 digunakan sebagai rujukan utama perubahan dan dilanjutkan dengan analisis konsistensinya pada rumusan kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 berpedoman pada :

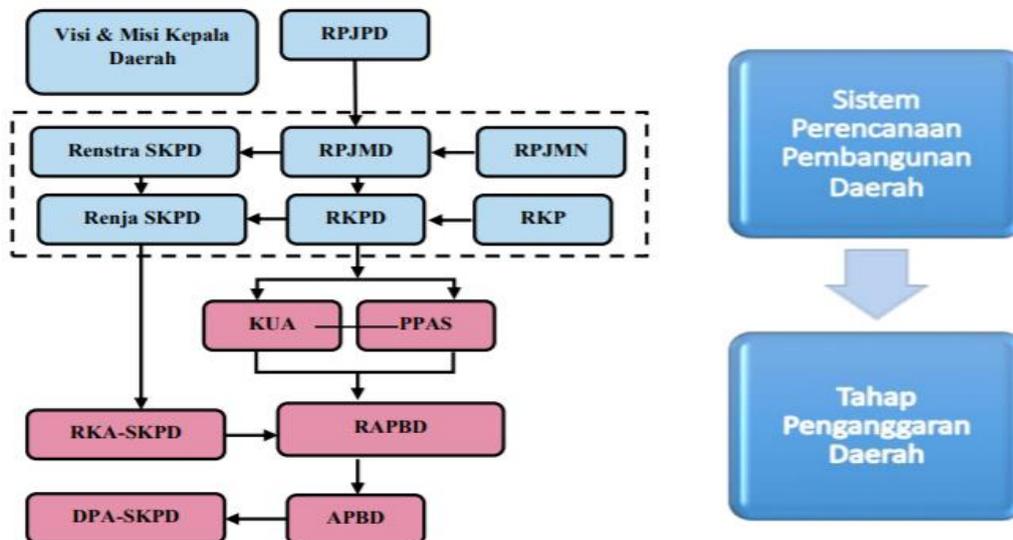
- A. Kebijakan tahapan RPJMD 2019-2023 tahun keempat, yaitu penyalarsan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan

lintas perangkat daerah, serta penyalarsan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten/Kota;

B. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yaitu penyalarsan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP tahun 2023;

C. Selanjutnya RKPD tahun 2023 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem ini dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan rencana kerja pada tahun 2023 ini didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi bisa sinkron dengan peraturan di tingkat Pusat maupun daerah. Adapun landasan hukum untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan; Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 55 tahun 2016 tentang Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 90 Tahun 2009

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

Maksudnya : sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan dan menjalankan program dan kegiatan bidang kesehatan tahun 2023.

Tujuannya : untuk lebih terarah dan terukurnya kinerja program di sektor kesehatan sesuai target-target yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan yang disinkronkan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari V (lima) BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan

- 2.2 Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Uraian garis besar tentang pertimangan rumusan, dan dekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan, serta penjelasan pendanaan dan kesesuaian dengan RKPD.
- 4.2 Tabel rencana program, kegiatan, sub kegiatan dilengkapi dengan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

- A. Catatan Penting
- B. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- C. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan pada Tahun 2023 tetap mengacu pada pencapaian indikator program kesehatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023 maupun dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Berdasarkan APBD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 050/1390/B.PPEPD-Bapp/2022, Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi Belanja Sebesar Rp. 151.180.530.000, untuk melaksanakan 5 Program yang dijabarkan dalam 15 Kegiatan dengan 53 Sub Kegiatan. Data selengkapnya mengenai perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Dinas Kesehatan yang mengacu pada target program/kegiatan Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Timur

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (Tahun N-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (Tahun Lalu/N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (N-1)/2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Tahun berjalan/N-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)/2021	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun N-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	0	0	0	0	10	Dokumen	0	0

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	0	0	0	0	8	Laporan	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194	Orang/Bulan	0	0	0	0	194	Orang/Bulan	0	0
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	0	0	0	0	12	Dokumen	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	0	0	0	1	Laporan	0	0
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	0	0	0	0	1	Laporan	0	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	0	0	1	Paket	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	0	0	0	0	50	Orang	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	1	Paket	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	0	0	0	0	5	Paket	0	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	0	0	0	0	12	Paket	0	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	0	0	0	0	12	Dokumen	0	0
	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	0	0	0	0	12	Laporan	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0	0	0			0	0
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	0	0	0	0	2	Unit	0	0

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	0	0	0	0	12	Bulan	0	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	0	0	0	0	12	Laporan	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	0	0	0	12	Laporan	0	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	0	0	0	0	12	Laporan	0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1	Laporan	0	0	0	0	1	Laporan	0	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	0	0	0	0	25	Unit	0	0

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	0	0	0	1	Unit	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	0	0	0	0	1	Unit	0	0
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	68	%	0	0	0	0	68	%	0	0
		Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80	%	0	0	0	0	80	%	0	0

	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	1	Layanan	0	0	0	0	1	Layanan	0	0
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25	Unit	0	0	0	0	25	Unit	0	0
	Distribusi Alat Kesehatan, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	10	Paket	0	0	0	0	10	Paket	0	0
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2	Layanan	0	0	0	0	2	Layanan	0	0

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833,578	Orang	0	0	0	0	833,578	Orang	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75	Orang	0	0	0	0	75	Orang	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0

	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8	Dokumen	0	0	0	0	8	Dokumen	0	0

	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	Unit	0	0	0	0	5	Unit	0	0
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12	Paket	0	0	0	0	12	Paket	0	0
	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	Dokumen	0	0	0	0	3	Dokumen	0	0

	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	Unit	0	0	0	0	1	Unit	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	Unit	0	0	0	0	1	Unit	0	0
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	6	Unit	0	0	0	0	6	Unit	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	50	%	0	0	0	0	40	%	0	0
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200	Orang	0	0	0	0	175	Orang	0	0

	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400	Orang	0	0	0	0	400	Orang	0	0
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94	%	0	0	0	0			0	0
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Perizinan	30	Sarana	0	0	0	0	30	Sarana	0	0

	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	2	Dokumen	0	0	0	0	2	Dokumen	0	0
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2	Sarana	0	0	0	0	2	Sarana	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4	Kab/Kota	0	0	0	0	4	Kab/Kota	0	0
	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	60	%	0	0	0	0	60	%	0	0

	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0

	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100	%	0	0	0	0	100	%	0	0
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	0	0	0	0	1	Dokumen	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaiannya mengalami beberapa hambatan yang cukup signifikan seperti penyediaan dan pemerataan fasilitas kesehatan khususnya di daerah 3T belum optimal, distribusi tenaga kesehatan masih belum merata khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T), alat kesehatan pada puskesmas dan Rumah Sakit Pratama belum memadai, akses jalan/infrastruktur yang menuju tempat pelayanan kesehatan kurang memadai khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T), kesadaran perilaku masyarakat hidup sehat masih kurang, Belum optimalnya dukungan lintas sektor terkait dalam upaya penyelesaian masalah isu kesehatan nasional, pandemi Covid 19 menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat. Sehingga pelaksanaan program bidang kesehatan berfokus pada penanganan Covid-19. Saat ini bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang mempunyai tugas dan beban cukup berat dalam menangani dampak pandemi Covid-19, dimana perlu perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Untuk menanggulangi dampak Covid-19, perlu adanya reformasi di bidang Kesehatan yang ditekankan pada pengendalian penyebaran penyakit menular. Pelayanan Kesehatan dan surveilans. Sehingga pasca Covid-19 akan difokuskan kepada Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat Kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana Kesehatan serta masyarakat keluarga miskin yang terdampak penyakit menular.

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat Kesehatan suatu masyarakat. Adapun beberapa capaian pada indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang Kesehatan yaitu :

Kematian Ibu, Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Tren jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017-2018 sudah terjadi penurunan, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian

bayi (0-11) bulan sudah mengalami penurunan. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 Provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi Stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan Cut of Point menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Rata-rat prevalensi stunting Kab/Kota pada tahun 2019 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali kota Balikpapan sudah mencapai 14 persen.

Angka Kematian Ibu dan Stunting merupakan Major Project sedangkan Angka Kematian Bayi dan Wasting merupakan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Sejak tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 lokus yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahun 2020 bertambah 2 lokus yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara sehingga menjadi 4 lokus, sementara tahun 2021 bertambah 2 lokus lagi yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan pada tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menjadi daerah lokus stunting. Hasil Riskesdas 2018 angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 29,20 persen sementara Hasil SGGBI tahun 2019 sebesar 28,10 persen dan hasil e-PPGBM sebesar 22,80 persen dari 36,62 persen yang diukur. Untuk wasting sendiri hasil Riskesdas 2018 sebesar 7,60 persen dan dari ePPGM 7,2 persen dari target 9 persen. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat daerah terkait dalam rangka Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu, Bayi dan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi pencapaian kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/PP06/08	Target Renstra OPD				Realisasi Renstra OPD		Proyeksi	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
				(tahun N-2)	(tahun N-1)	(tahun N)	(tahun N+1)	(tahun N-2)	(tahun N-1)	(tahun N)	(tahun N+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	8	8	0	0	8	8
3	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	194	194	0	0	194	194
4	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12
5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
6	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

	Lanjut Pemeriksaan										
7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
8	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
9	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50
11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5

	yang Disediakan											
13	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12	
14	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12	
15	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12	
16	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	
17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12	
18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12	

19	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	0	0	0	25	25	0	0	25	25
20	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
21	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
22	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
23	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0	0	0	0	25	25	0	0	25	25

24	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
25	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10
26	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	0	0	0	0	833.578	833.578	0	0	833.578	833.578
27	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	0	0	0	75	75	0	0	75	75

28	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
29	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
30	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
31	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
32	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
33	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
34	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

35	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
36	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
37	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
38	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
39	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
40	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

41	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
42	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
43	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
44	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	0	0	0	0	8	8	0	0	8	8
45	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5

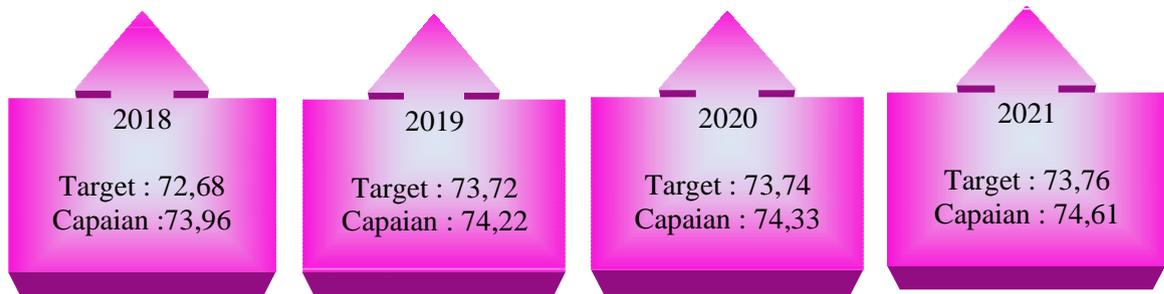
	Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)										
46	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0	0	0	0	12	12	0	0	12	12
47	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
48	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
49		0	0	0	0			0	0		
50	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3
51		0	0	0	0			0	0		
52	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

53	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	6	6	0	0	6	6
54	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	0	0	0	0	400	400	0	0	400	400
55	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
56	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	0	0	0	0	30	30	0	0	30	30
57	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2

58	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
59	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
60	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
61	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

	Bersih dan Sehat										
62	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

Umur Harapan Hidup



Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Umur Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya pada tahun 2020 mencapai 74,33 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 74,61 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2021 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74 tahun. Sehingga angka ini bisa dikatakan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun. Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi yaitu mencapai 74,76 tahun dan Kabupaten Berau memiliki usia harapan hidup mencapai 72,32 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Berau pada tahun 2021 akan memiliki harapan hidup hingga usia 72 tahun.

Jika dibandingkan dengan Provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 73,46 tahun. Namun laju pertumbuhan terendah lima tahun terakhir terjadi di Kalimantan Selatan.

Pola spasial capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota tahun 2021 menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu wilayah maupun negara menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya. Dalam upaya mencapai peningkatan tersebut maka dilakukan kerja sama lintas sektor, karena Umur Harapan Hidup dipengaruhi banyak faktor. Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai SKPD Utama untuk mencapai indikator tersebut, melakukan berbagai upaya melalui program-program kegiatan yang ada di dalam Renstra SKPD. Berikut capaian kinerja SKPD yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2021:

Tabel Pencapaian Kinerja OPD selama 3 tahun terakhir berdasarkan Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2019			2020			2021		
				Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya Status Kesehatan & Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	%	30,08	28,1	93,42	29,56	28,1	95,06	26,5	22,8	113,96
		Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	90	79	87,78	85	92	108,24	80	168	-10
		Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	581	688	118,42	557	662	118,85	533	702	68,29
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	50	88,29	176,58	60	88,29	147,15	70	91,09	130
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase Pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)	%	57	67,3	118,07	58	28,2	48,62	55	50	84,7
		TBC/Case Detection Rate (CDR) Persentase Temuan kasus	%	50	54	108,00	55	27	49,09	60	36,07	60,1
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	%	55	53,1	96,55	60	31,2	52,00	75	27,88	37,2
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapat layanan sesuai standar	%	55	78,94	143,53	60	59,1	98,50	75	59,16	76,9

Dari data diatas untuk balita stunting trend capaian dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan/perbaikan, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya status gizi balita di Provinsi Kalimantan Timur. Prevalensi Stunting tahun 2018 adalah data hasil survei Riskesdas, tahun 2019 dan 2020 adalah dari Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). Tahun 2021 tidak dilaksanakan survey terkait status gizi, sehingga masih menggunakan data survey tahun sebelumnya. Kematian Ibu dan kematian bayi jumlah kasusnya setiap tahun berfluktuatif, dan untuk tahun 2020 capaian mengalami penurunan dimana lebih banyak kasus dari target yang ditetapkan, namun jumlah kasus kematian ibu meningkat dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari penyebab

kematian ibu terbesar adalah Perdarahan, hal ini erat kaitan dengan bagaimana antenatal care selama kehamilan ibu, penyebab tidak langsung peningkatan kasus kematian ibu adalah masih kurangnya kesadaran ibu hamil untuk rutin memeriksakan diri selama kehamilan; nutrisi ibu yang tidak adekuat selama kehamilan dan kondisi penyakit penyerta selama kehamilan ibu. Begitu pula dengan kematian bayi jumlah kasus meningkat dari tahun sebelumnya, penyebab kematian tertinggi adalah karena Diare dan pneumonia. Status gizi balita sangat terkait erat terhadap kejadian diare dan pneumonia serta faktor sanitasi lingkungan. Untuk capaian persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi sudah mencapai target. Fasilitas kesehatan yang terakreditasi adalah Rumah Sakit dan Puskesmas, hal ini didukung dengan Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Untuk Akreditasi Rumah Sakit, capaian 2019 dan 2020 tidak terjadi kenaikan/penurunan capaian, hal ini disebabkan karena mengacu surat edaran nomor : HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang perizinan, dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan penetapan rumah sakit pendidikan pada masa pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), dinyatakan bahwa Rumah sakit yang masa berlaku sertifikat akreditasinya berakhir baik sebelum maupun sesudah Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah, maka sertifikat akreditasinya masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut. Pada Akreditasi Puskesmas, untuk realisasi target thn 2019 capaian melebihi target karena ditahun tersebut segala upaya dan dukungan telah dilakukan disamping sumber daya relatif tersedia. Prestasi kerja ditahun 2019

merupakan hasil kerjasama optimal antara Provinsi dan Kabupaten Kota dengan dukungan kebijakan dari Kemenkes RI. Sementara untuk capaian tahun 2020 tidak ada penambahan capaian karena pada tahun 2020 ada bencana pandemi covid-19 sehingga Kemenkes RI mengeluarkan kebijakan penundaan survei akreditasi puskesmas di tahun 2020 sampai dengan sekarang, sehingga rencana survei untuk puskesmas yang tersisa tidak dapat dilaksanakan dan otomatis status puskesmas terakreditasi tidak dapat diperoleh. Terkait capaian pengobatan HIV dan temuan kasus TBC dengan terjadinya Pandemi Covid-19 membuat kunjungan pasien termasuk ODHA maupun pasien TBC berkurang, baik untuk yang memulai pengobatan maupun yang melanjutkan pengobatan. Adanya pembatasan kegiatan kunjungan rumah selama pandemi membuat penemuan kasus TBC maupun kasus pemeriksaan pada populasi beresiko HIV tidak dilakukan Petugas kesehatan di fasilitas kesehatan & Dinas Kesehatan. Dilihat dari realisasi tahun 2020 persentase penderita hipertensi yang mendapat layanan sesuai standart sebesar 31,2% artinya 50% menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni Tahun 2018 sebesar 56,86% dan tahun 2019 sebesar 53,10%. Hal ini dikarenakan situasi Pandemi Wabah Covid-19 sehingga kunjungan Posbindu sempat ditiadakan dan kunjungan ke Puskesmas juga berkurang dari biasanya. Sedangkan untuk Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapat layanan sesuai standart realisasi Tahun 2020 sebesar 59,1% yang artinya realisasi hampir mencapai target, berbeda dengan realisasi Tahun dua tahun sebelumnya Tahun 2018 sebesar 70% dan 2019 sebesar 78,94% yang mencaapai target. Hal ini juga dikarenakan situasi pandemi Wabah Covid-19 sehingga realisasi dibawah target, dikarenakan Posbindu tidak semua Kabupaten kota berjalan, dan kunjungan ke Puskesmas juga menurun.

Tabel Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target RPJMD/RENSTRA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir	Realisasi	% Capaian Kinerja	Tingkat Kemajuan
				RPJMD			
1.	Meningkatnya Status Kesehatan & Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	%	26,5	22,8	113,96	Capaian tahun 2021 belum optimal, namun telah menunjukkan progres yang cukup baik
		Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	80	168	-10	
		Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	533	702	68,29	
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	70	91,09	130	
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase Pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)	%	55	50	84,7	
		TBC/Case Detection Rate (CDR)	%	60	36,07	60,1	
		Persentase Temuan kasus penderita Hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	%	75	27,88	37,2	
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapat layanan sesuai standar	%	75	59,16	76,9	

1) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Kesehatan adalah :

- a) Dukungan dan komitmen Pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi isu-isu kesehatan nasional.
- b) Tersedianya sumber pendanaan yang memadai baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- c) Sumber daya manusia kesehatan yang tersedia meliputi berbagai latar belakang pendidikan bidang kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan.
- d) Tersedianya regulasi yang mengatur pelaksanaan program-program di bidang kesehatan

- e) Adanya dukungan lintas sektor terkait dalam upaya penyelesaian isu kesehatan nasional.

Dalam pencapaian target kinerja juga dihadapkan pada beberapa permasalahan/kendala antara lain :

- a) Penyusunan rencana kegiatan yang belum optimal, dimana kegiatan yang dilaksanakan belum menasar pada indikator yang ingin dicapai.
- b) Penyusunan rencana kegiatan yang masih belum mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan
- c) Belum terdistribusinya tenaga kesehatan secara merata terutama di daerah-daerah perbatasan & terpencil.
- d) Belum optimalnya dukungan lintas sektor terkait dalam upaya penyelesaian masalah isu kesehatan nasional
- e) Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 yang lalu menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat. Sehingga pelaksanaan program-program bidang kesehatan kini terfokus pada penanganan Covid-19.

Dalam upaya mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi dilakukan beberapa upaya alternatif solusi yaitu :

- a) Komitmen bersama dalam penetapan rencana kegiatan yang mengacu pada RENSTRA yang telah ditetapkan.
- b) Advokasi ke pemerintah daerah terkait pemenuhan tenaga kesehatan dan menyediakan informasi yang valid tentang kondisi tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan.
- c) Mengoptimalkan upaya terintegrasi dengan lintas program maupun lintas sektor dengan sektor terkait lainnya, melalui upaya pertemuan lintas sektor terkait.
- d) Pandemi Covid-19 menuntut untuk melakukan perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit termasuk

dari penyakit hari esok.

- 2) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam Perubahan RENSTRA 2019-2023 terdapat 5 program yang dilaksanakan yaitu:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program ini merupakan program pendukung dalam kegiatan utama di SKPD yang harus ada untuk menunjang pelaksanaan bidang Kesehatan dimana didalamnya mencakup gaji, tunjangan, pengadaan/pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana aparatur dan perkantoran.

- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada program ini berisi kegiatan distribusi obat ke kabupaten/kota, pengadaan obat buffer stok obat dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat di kabupaten/kota. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja utama dimana memastikan ketersediaan obat & vaksin di faskes kesehatan. Penguatan pada program ini adalah untuk menyiapkan data rencana kebutuhan obat (RKO), untuk itu perlu pendampingan dan pembinaan provinsi ke kab/kota dalam menghitung kebutuhan obat & vaksin di faskes, selain itu juga perlu penguatan dalam menjaga mutu dan kualitas vaksin melalui upaya peningkatan kualitas penyimpanan vaksin yang baik.

Pada program ini dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap capaian program kesehatan ibu & anak dan peningkatan status gizi masyarakat.

Penguatan yang perlu dilakukan adalah fokus & lokus kegiatan yang dilakukan berbasis pada data capaian yang terupdate sehingga pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran.

Pada program ini dilaksanakan upaya pemenuhan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin & tidak mampu. Pelaksanaan program ini

sangat tergantung pada data penerima bantuan iuran (PBI) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, sehingga perlu koordinasi yang intens dengan Dinas sosial dalam upaya pencapaian target sasaran.

Penguatan upaya promotif & preventif serta pemberdayaan masyarakat dan sektor terkait guna menyelesaikan masalah kesehatan yang menjadi indikator kinerja utama yang memerlukan dukungan sektor lain. Selain itu perlu dilakukan penguatan komitmen lintas sektor terkait untuk membantu penyelesaian masalah kesehatan yang memerlukan dukungan berbagai sektor seperti pada penanganan Stunting dan mengurangi kematian ibu melahirkan.

Pada program ini dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap capaian program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, penguatan pada program ini adalah fokus & lokus kegiatan yang dilakukan berbasis pada data capaian yang terupdate sehingga pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran.

Pada program ini dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap capaian program pelayanan kesehatan dan memacu kab/kota agar dapat meningkatkan status akreditasi fasilitas kesehatan, baik di tingkat dasar maupun di fasilitas rujukan. Penguatan yang perlu dilakukan adalah fokus & lokus pada fasilitas kesehatan yang akan ditingkatkan status akreditasinya.

Pada program ini dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap capaian program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, penguatan pada program ini adalah fokus & lokus kegiatan yang dilakukan berbasis pada data capaian yang terupdate sehingga pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada program ini dilaksanakan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap capaian program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan penyediaan data ketersediaan tenaga kesehatan di provinsi Kalimantan Timur. Penguatan yang perlu dilakukan adalah fokus & lokus kegiatan yang dilakukan berbasis pada data capaian yang terupdate

sehingga pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran dan penguatan advokasi ke pemerintah daerah terkait pendistribusian tenaga dengan basis data tenaga kesehatan yang akurat.

- d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3) Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pemanfaatan sumber daya baik dari segi sumber daya manusia dan pengangguran telah dilaksanakan secara optimal di tahun 2021 dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya status kesehatan Ibu dan Anak	Prevalensi Balita Stunting	95,06	72,36	1,31
		Jumlah Kematian Ibu	108,24		
		Jumlah Kematian Bayi	118,85		
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	147,15		
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Persentase Pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)	48,62		
		TBC/Case Detection Rate (CDR) Persentase Temuan kasus	49,09		
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	52,00		
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapat layanan sesuai standar	98,50		

Dari tabel diatas tergambar bahwa serapan anggaran cukup baik, namun untuk capaian realisasi keuangan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala terkait pelaksanaan kegiatan yang dapat

dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dinas Kesehatan, pagu anggaran sebesar Rp. 129.592.600.000,- realisasi sebesar Rp. 110.225.485.368- (85,06%).
- b) BAPELKES, pagu sebesar Rp. 4.150.613.573,- realisasi sebesar Rp.3.490.103.558 (84,09%).
- c) UPTD LABKES : pagu sebesar Rp. 7.162.799.697,- realisasi sebesar Rp.6.038.793.966,- (84,31%).
- d) RSUD KORPRI , pagu anggaran sebesar Rp. 10.394.293.181,- realisasi sebesar Rp. 8.848.117.457,- (85,12%).
- e) RS. Mata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.043.825.080,- dan realisasi sebesar Rp. 4.662.247.218,- (92,43%).
- f) BLUD Laboratorium dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.865.123.001,- dan realisasi sebesar Rp. 5.077.561.536,- (86,57%).
- g) BLUD RS. Mata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.481.618.267,- dan realisasi sebesar Rp. 3.397.237.754,- (61,98%).

4) Realisasi Anggaran

a) Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	%	Total APBD Non Gaji		Jumlah Program/ Kegiatan yang dialokasikan		Total Program/Kegiatan dalam Renstra		Ket
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji & Tunjangan	Prog	Keg	Prog	Keg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	58.435.225.523	53.300.513.284	5.134.712.239	91,21	4.454.622.197	29.326.422.000	12	21	25	93	
2019	154.858.446.701	85.812.663.725	69.045.782.976	55,41	7.794.298.812	32.852.611.350	19	26	19	26	
2020	121.643.393.583	88.017.402.035	33.625.991.548	72,36	8.481.850.000	29.024.001.000	12	30	12	30	
2021	129.592.600.000	110.225.485.368	0	85,06	-	36.438.671.000	5	16	5	16	

b) Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

KODE REK	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN MURNI(RP)	PAGU SETELAH REFOCUSING	REALISASI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021	
				KEUANGAN	% KEU
01.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44,609,067,584	46,190,884,084	39,051,522,400	84.54
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	433,812,645	722,262,645	320,567,199	44.38
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305,484,198	593,934,198	243,494,199	41.00
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128,328,447	128,328,447	77,073,000	60.06

1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36,943,171,000	36,943,171,000	32,912,833,803	89.09
1.02.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36,438,671,000	36,438,671,000	32,571,114,183	89.39
1.02.01.1.02.03		Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	454,500,000	454,500,000	306,616,750	67.46
1.02.01.1.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	10,000,000	9,705,100	97.05
1.02.01.1.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000	10,000,000	8,386,170	83.86
1.02.01.1.02.06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000	10,000,000	5,268,350	52.68
1.02.01.1.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20,000,000	20,000,000	11,743,250	58.72
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		694,034,196	694,034,196	230,027,180	33.14
1.02.01.1.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200,000,000	200,000,000	191,400,000	95.70
1.02.01.1.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	494,034,196	494,034,196	38,627,180	7.82
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2,422,885,502	3,716,252,002	2,061,278,985	55.47
1.02.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000	40,000,000	39,896,000	99.74
1.02.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,004,169,698	1,004,169,698	957,614,433	95.36
1.02.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000	50,000,000	44,972,700	89.95
1.02.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000	40,000,000	20,956,000	52.39
1.02.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,288,715,804	2,582,082,304	997,839,852	38.64
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		387,500,000	387,500,000	307,151,000	79.26
1.02.01.1.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	387,500,000	387,500,000	307,151,000	79.26
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,858,964,241	2,858,964,241	2,499,959,377	87.44
1.02.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,700,000	5,700,000	5,418,100	95.05
1.02.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	606,000,000	606,000,000	495,753,216	81.81
1.02.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,247,264,241	2,247,264,241	1,998,788,061	88.94
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		868,700,000	868,700,000	719,704,856	82.85
1.02.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150,900,000	150,900,000	53,951,498	35.75
1.02.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115,000,000	115,000,000	109,542,320	95.25
1.02.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	602,800,000	602,800,000	556,211,038	92.27
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		81,699,854,353	81,461,729,123	69,702,771,259	85.57

1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7,365,268,930	4,004,230,430	2,437,955,083	60.88
1.02.02.1.01.02		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300,000,000	300,000,000	247,974,600	82.66
1.02.02.1.01.03		Pengembangan Rumah Sakit	400,000,000	400,000,000	191,367,000	47.84
1.02.02.1.01.04		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	638,710,000	638,710,000	568,718,550	89.04
1.02.02.1.01.06		Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	636,498,794	285,588,294	173,542,850	60.77
1.02.02.1.01.17		Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	653,500,000	653,500,000	169,994,400	26.01
1.02.02.1.01.21		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,736,560,136	1,726,432,136	1,086,357,683	62.93
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		73,087,445,423	76,132,358,693	66,680,744,046	87.59
1.02.02.1.02.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	700,000,000.00	2,746,052,700	832,958,401	30.33
1.02.02.1.02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	636,485,000.00	636,485,000	374,978,700	58.91
1.02.02.1.02.03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0.00	520,000,000	0	0.00
1.02.02.1.02.04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	360,604,500.00	360,604,500	186,018,900	51.59
1.02.02.1.02.06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,067,629,760.00	4,107,645,000	2,541,630,400	61.88
1.02.02.1.02.07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0.00	260,000,000	0	0.00
1.02.02.1.02.08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	500,000,000.00	792,500,000	327,524,400	41.33
1.02.02.1.02.09		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0.00	370,949,800	124,516,600	33.57
1.02.02.1.02.10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1,000,000,000.00	1,000,000,000	486,282,400	48.63
1.02.02.1.02.11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,100,000,000.00	1,906,019,500	1,409,143,150	73.93
1.02.02.1.02.13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100,000,000.00	100,000,000	67,343,400	67.34
1.02.02.1.02.14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	100,000,000.00	100,000,000	82,635,800	82.64
1.02.02.1.02.15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	116,030,011.00	116,030,011	89,422,080	77.07
1.02.02.1.02.16		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	58,589,351.052	58,589,351,052	57,136,831,800	97.52
1.02.02.1.02.18		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	612,255,100.00	612,255,100	440,564,500	71.96
1.02.02.1.02.19		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3,290,090,000.00	1,999,466,030	1,450,257,965	72.53
1.02.02.1.02.20		Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	900,000,000.00	900,000,000	757,678,800	84.19

1.02 . 02 . 1.02 . 21		Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	400,000,000.00	400,000,000	299,299,850	74.82
1.02 . 02 . 1.02 . 23		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	300,000,000.00	300,000,000	40,631,800	13.54
1.02 . 02 . 1.02 . 25		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	315,000,000.00	315,000,000	33,025,100	10.48
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		1,247,140,000	1,247,140,000	584,072,130	46.83
1.02.02.1.03.01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1,147,140,000	1,147,140,000	584,072,130	50.92
1.02.02.1.03.02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100,000,000	100,000,000	0	0.00
1.02 . 02 . 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		0	78,000,000	16,919,750	21.69
1.02 . 02 . 1.04 . 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		0	78,000,000	16,919,750	21.69
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1,790,115,000	885,677,000	770,835,750	87.03
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		1,110,115,000	205,677,000	170,124,250	82.71
1.02.05.1.01.01		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1,110,115,000	205,677,000	170,124,250	82.71
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		680,000,000	680,000,000	600,711,500	88.34
1.02.05.1.02.01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	680,000,000	680,000,000	600,711,500	88.34
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1,250,271,793	961,821,793	686,771,959	71.40
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		300,000,000	11,550,000	8,506,400	73.65
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		300,000,000	11,550,000	8,506,400	73.65
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		950,271,793	950,271,793	678,265,559	71.38
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		661,921,553	661,921,553	458,366,400	69.25
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		288,350,240	288,350,240	219,899,159	76.26
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		243,291,270	92,488,000	13,584,000	14.69

1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	243,291,270	92,488,000	13,584,000	14.69
1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	243,291,270	92,488,000	13,584,000	14.69
TOTAL ANGGARAN		129,592,600,000	129,592,600,000	110,225,485,368	85.06

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan berbagai pengamatan terhadap berbagai kondisi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur maka beberapa isu penting yang hendaknya mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Perlunya peningkatan upaya keterjaminan ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem penjaminan pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, melalui JKN (BPJS);
- b. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, dimana masih tingginya kejadian penyakit menular seperti TB Paru, Demam berdarah, dll yang harus dilakukan surveilans pengawasan secara lebih baik sehingga dapat ditanggulangi dan diintervensi secara dini sehingga tidak menjadi wabah serta masih tingginya insiden / prevalensi penyakit menular yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa;
- c. Perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih maksimal dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat sehingga masyarakat tidak mengalami kesakitan, karena upaya pengobatan penyakit akan membutuhkan dana yang sangat tinggi;
- d. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik, ketersediaan aset berupa lahan/tanah untuk pengembangan bangunan sarana kesehatan yang terbatas;
- e. Sumber anggaran sektor kesehatan yang belum mencukupi;

- f. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin dan daerah terpencil, terluar dan terdepan;
- g. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;
- h. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan;
- i. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas;
- j. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan;
- k. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor;
- l. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal serta masih rendahnya kesadaran untuk hidup masyarakat dalam lingkungan yang sehat;
- m. Belum optimalnya pendataan kesehatan yang cepat, akurat dan valid yang berakibat terlambatnya penetapan kebijakan dan intervensi.
- n. Adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda wilayah Kalimantan Timur sehingga menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, serta berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

2.4 Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

1) Permasalahan

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, dan peran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan kesehatan, dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ke depan dan harus menjadi perhatian adalah :

- a. Derajat kesehatan masyarakat meningkat tetapi beberapa penyakit menular seperti Demam Berdarah, TB Paru, Malaria, HIV-AIDS masih tinggi dan cenderung meningkat. Demikian juga dengan penyakit tidak menular seperti Jantung, Hipertensi, Diabetes Militus, Kanker, gangguan kejiwaan cenderung mengalami peningkatan. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular bahkan akhir-akhir ini timbul Kejadian Luar Biasa Penyakit Difteri.
- b. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan rujukan masih belum memenuhi standar pelayanan. Terbatasnya dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan. Jauhnya jarak dari pemukiman ke pusat pelayanan kesehatan di daerah 3T. Terbatasnya pelayanan jaringan telekomunikasi untuk penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan.
- c. Citra pelayanan yang masih kurang memuaskan yang ditandai dengan banyaknya keluhan terutama pada pelayanan yang lambat, berbelit-belit.
- d. Perilaku masyarakat dan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat belum menunjukkan peningkatan sesuai dengan harapan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas air permukaan, dan air tanah sehingga berakibat terhadap pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga.
- e. Perkembangan daerah menuju perkotaan baru, pengaruh budaya dari luar dalam penggunaan IPTEK tanpa batas, berpotensi sebagai ancaman bagi masyarakat kedepan akan munculnya penyakit menular seperti DBD, malaria dan penyakit yang berdampak sosial besar seperti HIV-AIDS, penyalahgunaan NAPZA (narkotika).
- f. Sumber daya kesehatan berupa tenaga kesehatan, dana dan peralatan medis belum mencukupi sesuai standar kebutuhan, sementara itu bermunculan sarana pelayanan kesehatan baru dengan pesatnya termasuk yang tradisional, dimana pengawasan dan pengendalian masih lemah dan regulasi belum menjamin kepastian pemberian pelayanan yang aman dan berkualitas. Distribusi jumlah tenaga

kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan.

- g. Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan kinerja minimal yang dilakukan di pelayanan kesehatan dasar untuk menjamin kualitas pelayanan. Rumah Sakit pemerintah yang ada di Kalimantan Timur sebanyak 46 buah baik milik Pemerintah maupun swasta. Pelayanan gawat darurat di UGD merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang harus dicapai seluruh Rumah Sakit. Saat ini rata-rata Rumah sakit yang memiliki pelayanan kegawatdaruratan masih dengan level 1, sedangkan tuntutan dan teknologi pelayanan kesehatan semakin berkembang. Persaingan semakin ketat dengan pelayanan pihak swasta. Pengembangan tempat pelayanan, jenis, kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sangat diperlukan khususnya juga di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan.

2). Isu Strategis

- a. Draft Rancangan Awal RKP 2019 dengan TEMA: "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Kesehatan merupakan bagian dari PN 1: Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Kegiatan Prioritas:
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana.
 - Pencegahan dan pengendalian penyakit
 - Percepatan penurunan stunting
 - Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Selanjutnya hasil forum SKPD telah menghasilkan kesepakatan dengan pemerintah kabupaten dan kota sebagai berikut :
- Distribusi Tenaga kesehatan masih belum merata
 - Angka kematian ibu masih tinggi
 - Sarana dan prasarana di daerah tertinggal masih belum sesuai standart Pemerintah Kab/Kota memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi berupa:

- 1) Pengadaan sanitarian kit.
- 2) Pengadaan Blanko TB dan KIE
- 3) Pendampingan akreditasi puskesmas
- 4) Pelatihan bagi petugas SIK puskesmas dan Dinkes
- 5) Pemenuhan sarana prasarana dan alkes puskesmas dan RS :
alkes, ambulance, kendaraan operasional air dan roda dua,
pembangunan puskesmas dan pembangunan rumah dinas
nakes (Bankeu)
- 6) Rakerkesnas 2019 memfokuskan penuntasan permasalahan
kesehatan dengan menetapkan prioritas pada :
 1. Percepatan Eliminasi Tuberculosis dengan pokok bahasan:
Missing Cases, Compliance dan **MDR-TB.**
 2. Penurunan Stunting dengan pokok bahasan : **Pencegahan** dan
Intervensi.
 3. Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi dengan pokok
bahasan: **Peningkatan Cakupan, Peningkatan Mutu
Imunisasi dan Penguatan Surveilans.**

Dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Rakerkesda 2019
dengan menghasilkan kesepakatan :

1. Penanganan TBC yang lebih serius untuk menjangkau kasus
yang belum terdeteksi, melalui PIS-PK termasuk pelacakan
kasus gizi, Pemberdayaan masyarakat melalui kader dalam
Penanggulangan TBC.
2. Perluasan penemuan kasus pada kelompok berisiko seperti
pada Warga Binaan Rutan/Lapas, Sekolah Berasrama,
Masyarakat yang tinggal di Lingkungan Padat Kumuh.
3. Pemantapan pelaksanaan *Public Privat Mix*.
4. Sosialisasi dan *law enforcement* tentang kewajiban untuk
melaporkan kasus TBC (*mandatory notification*).
5. Sistem akreditasi RS seharusnya dikaitkan dengan notifikasi
kasus TBC dan dilaksanakannya pelayanan kasus TBC sesuai
standar.

6. Kepatuhan pengobatan TBC perlu melibatkan kader, peran keluarga, petugas Puskesmas sebagai PMO (Pemantau Menelan Obat), pelacakan kasus TBC mangkir oleh Puskesmas dan Pemberian konseling harus dilakukan sebelum pengobatan TBC dimulai.
7. Penanggulangan **TBC RO (TBC MDR)** dilakukan perluasan pembentukan kelompok *peer group* bagi pasien dan mantan pasien MDR, Penyediaan rumah singgah bagi pasien MDR, mendorong terlaksananya layanan TBC RO di Rumah Sakit sesuai Kepmenkes No. 350 tahun 2017.
8. Upaya menurunkan Stunting melalui **prevention and nutrition intervention** dilakukan dengan upaya-upaya melalui pendekatan “**Lifecycle**” utamanya pada **remaja** melalui transformasi UKS, pemberantasan kecacingan, Tablet Tambah Darah, KIE kesehatan bagi calon pengantin, Penundaan Perkawinan atau kehamilan sampai usia 20 tahun.
9. Peningkatan mutu Antenatal care dalam penerapan 10T, Seluruh Ibu Hamil melaksanakan Kelas Ibu Hamil, Peningkatan cakupan dan *compliance* tablet tambah darah, Pemberian makanan tambahan kepada seluruh Ibu hamil, Ibu menyusui diperlukan untuk kecukupan gizi terpenuhi.
10. Pada **bayi 0 – 5 bulan**: Menjamin semua bayi baru lahir mendapat IMD, mendapatkan ASI Eksklusif, menjamin semua bayi mendapat pelayanan KN1, dan mendapatkan pelayanan dan pemantauan pertumbuhan dan SDIDTK. **Bayi 6 – 23 bulan**; Menjamin semua mendapat ASI, makanan Pendamping ASI, vitamin dan mendapatkan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan SDIDTK.

APBD 2022 yang merupakan pelaksanaan RKPD 2022 disusun berdasarkan asumsi atas kondisi perekonomian yang terjadi sampai dengan akhir tahun 2021. Namun ketika pelaksanaan APBD 2021 terjadi perubahan dari beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, realisasi PDRB dengan migas yang didominasi *lifting* minyak

dan produksi batubara, tingkat inflasi, nilai ekspor impor daerah, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bulan Maret 2020. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sejalan dengan Permendagri Nomor : 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan diperoleh berdasar hasil usulan dari Bidang-Bidang di Dinas Kesehatan. Usulan dari luar Dinas Kesehatan diperoleh dari hasil Musrenbang Kabupaten/Kota, dan Forum Perangkat Daerah. Proses penyampaian usulan kegiatan dan program tersebut dilaksanakan dengan maksud bisa dilakukan perencanaan dengan sistem bottom up baik dari UPTD maupun dari masyarakat langsung, sehingga perencanaan tidak dilakukan Sentralistik di Provinsi. Hasil usulan kemudian ditentukan skala prioritasnya berdasarkan ketersediaan pagu anggaran dan juga pada kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang akan dicapai tanpa meninggalkan pencapaian indikator yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Renstra Dinas Kesehatan.

Setelah melalui pembahasan yang intensif dan rasionalisasi program untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang optimal, maka rancangan akhir rencana kerja Dinas Kesehatan dengan pagu indikatif sejumlah Rp 126.048.484.384,00 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Data selengkapnya mengenai perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Dinas Kesehatan yang mengacu pada target program/kegiatan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.4:

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Penting				
				Capaian					Capaian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
DINAS KESEHATAN															
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	118,980,530,000				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	129,346,530,000				
	01	1.0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Kaltim	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	42,350,508,600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Kaltim	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	47,350,508,600	
	01	1.0	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	1,450,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	1,450,000,000	
	01	1.0	07		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	1,100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	1,100,000,000	
	01	1.0	2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	350,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	350,000,000	
	01	1.0	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	33,368,840,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	38,368,840,000	

		01	1.02	03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194	33,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kaltim	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194	38,000,000,000	
		01	1.02	05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	318,840,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	318,840,000	
		01	1.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	10,000,000	
		01	1.02	07	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	10,000,000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	10,000,000	
		01	1.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	10,000,000	
		01	1.05		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	20,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	20,000,000	

		01	1.05	02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100	407,653,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	100	407,653,000	
		01	1.05	09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	157,653,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi Kaltim	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	157,653,000	
		01	1.06		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	250,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kaltim	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	250,000,000	
		01	1.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2,994,015,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	2,994,015,600	
		01	1.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kaltim	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	40,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kaltim	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	40,000,000	
		01	1.06	05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	700,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kaltim	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	700,000,000	
		01	1.06	06	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Provinsi Kaltim	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	12	50,000,000	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Provinsi Kaltim	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	50,000,000	

		01	1.06	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	40,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	40,000,000	
		01	1.07		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2,164,015,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	2,164,015,600	
		01	1.07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kaltim			500,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kaltim			500,000,000	
		01	1.08		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	500,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	500,000,000	
		01	1.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kaltim	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	3,130,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kaltim	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	3,130,000,000	
		01	1.08	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	20,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	20,000,000	
		01	1.08	04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	710,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	710,000,000	

		01	1.09		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2,400,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2,400,000,000	
		01	1.09	02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1	500,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kaltim	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1	500,000,000	
		01	1.09	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	175,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kaltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	175,000,000	
		01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kaltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	150,000,000	
1	02				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	175,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kaltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	175,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh Kab/Kota	100		

1	0 2	0 2	1.0 1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	68	75,608,951,400	Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	68	80,704,951,400	
						Provinsi Kaltim	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80	592,930,000		Provinsi Kaltim	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80	592,930,000	
1	0 2	0 2	1.0 1	17	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Provinsi Kaltim	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	1	92,120,000	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Provinsi Kaltim	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	1	92,120,000	
1	0 2	0 2	1.0 1	21	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25	9,090,000	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25	9,090,000	

1	0 2	0 2	1.0 1	22	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	368,000,000	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	368,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 2		Pengadaan Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Kaltim	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	10	123,720,000	Pengadaan Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Kaltim	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	10	123,720,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2	74,522,421,400	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Tersedianya layanan Kesehatan Perorangan dan layanan Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh Kab/Kota	2	79,528,421,400	
1	0 2	0 2	1.0 2	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	#####	157,267,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Provinsi Kaltim	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833,578	157,267,000	

1	0 2	0 2	1.0 2	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Provinsi Kaltim	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75	194,467,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Provinsi Kaltim	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75	194,467,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2	364,098,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2	364,098,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	10,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	300,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	10,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	300,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	5,364,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	7,000,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	264,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	264,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	264,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	264,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	10	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	10,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	10,000,000	

1	0 2	0 2	1.0 2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	320,000,400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	320,000,400	
1	0 2	0 2	1.0 2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	691,123,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	691,123,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	188,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	188,800,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	10,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	10,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	17	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	65,300,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	68,000,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	10,000,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	10,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	19	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	300,000,000	

1	0 2	0 2	1.0 2	20	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2	282,568,000	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2	282,568,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	21	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2	217,432,000	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2	217,432,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	23	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8	67,200,000	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8	67,200,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	25	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Provinsi Kaltim	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	45,690,000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Provinsi Kaltim	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	45,690,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	26	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Provinsi Kaltim	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12	21,066,000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Provinsi Kaltim	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12	21,066,000	
1	0 2	0 2	1.0 2	27	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	10,000,000	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	100,000,000	

1	0 2	0 2	1.0 3		Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	420,710,000	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	420,710,000	
1	0 2	0 2	1.0 3	01	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Provinsi Kaltim	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100	450,000,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Provinsi Kaltim	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100	450,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 4		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	450,000,000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	450,000,000	
1	0 2	0 2	1.0 4	01	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	43,600,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	133,600,000	
1	0 2	0 2	1.0 4	03	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	33,600,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	33,600,000	
1	0 2	0 3			Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	6	10,000,000	Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	6	100,000,000	

1	0 2	0 3	1.0 2		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Provinsi Kaltim	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatn	50	558,558,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Provinsi Kaltim	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥45% Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatn	50	558,558,000	
1	0 2	0 3	1.0 2	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200	558,558,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	200	558,558,000	
1	0 2	0 3	1.0 2	02	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Kesehatan Manusia	Provinsi Kaltim	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400	511,418,000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Kesehatan Manusia	Provinsi Kaltim	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400	511,418,000	
1	0 2	0 4			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan Manusia	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	47,140,000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan Manusia	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	47,140,000	
1	0 2	0 4	1.0 1		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Provinsi Kaltim	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94	178,512,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Provinsi Kaltim	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94	268,512,000	

1	0 2	0 4	1.0 1	01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Provinsi Kaltim	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100	167,416,000	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Provinsi Kaltim	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100	257,416,000	
1	0 2	0 4	1.0 1	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Provinsi Kaltim	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	30	157,416,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Provinsi Kaltim	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	30	157,416,000	
1	0 2	0 4	1.0 2		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Provinsi Kaltim	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	2	10,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Provinsi Kaltim	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	2	100,000,000	
1	0 2	0 4	1.0 2	01	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Provinsi Kaltim	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100	11,096,000	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Provinsi Kaltim	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100	11,096,000	

1	0 2	0 5			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Provinsi Kaltim	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2	11,096,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Provinsi Kaltim	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2	11,096,000	
1	0 2	0 5	1.0 1		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Provinsi Kaltim	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4	284,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Provinsi Kaltim	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	4	464,000,000	
1	0 2	0 5	1.0 1	01	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	60	10,000,000	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	60	100,000,000	
1	0 2	0 5	1.0 2		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	10,000,000	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	100,000,000	

1	0 2	0 5	1.0 2	01	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	171,400,000	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	261,400,000	
1	0 2	0 5	1.0 2	02	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	161,400,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	161,400,000	
1	0 2	0 5	1.0 3		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	10,000,000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	100,000,000	
1	0 2	0 5	1.0 3	01	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100	102,600,000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100	102,600,000	
					Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	102,600,000	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Provinsi Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	102,600,000	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan, terlebih dahulu telah dilakukan penjarangan aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan OPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Provinsi. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan hasil analisis kebutuhan PD.

Usulan awal PD kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Forum PD dan Forum Musrenbang, baik musrenbang kab/kota dan Provinsi. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif Wilayah Provinsi dan Pagu Indikatif Sektoral.

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	Catatan Penting
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
DINAS KESEHATAN									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	
		01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	
		01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194	Orang/ Bulan	

		01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	
		01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	
		01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	
		01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	
		01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	
		01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	
		01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	
		01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	
		01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	
		01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	
		01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	
		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	
		01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	
		01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	
		01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	
		01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	

		01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	
		01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
		01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
					Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. dll) yang Dilakukan Pengembangan	1	Layanan	
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25	Unit	
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Dokumen	
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	10	Paket	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833,578	Orang	
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75	Orang	

1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2	Dokumen	
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	Dokumen	
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2	Dokumen	
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2	Dokumen	
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8	Dokumen	
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Penanganan Darurat (SPGDT) dan Sistem Gawat Terpadu	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	Unit	

1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12	Paket	
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	Dokumen	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	Unit	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	6	Unit	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400	Orang	
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	30	Sarana	
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	2	Dokumen	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				

1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2	Sarana	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
1	02	05	1.01		Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	
1	02	05	1.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024, Kementerian Kesehatan telah menyusun Renstra tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Renstra Kementerian Kesehatan juga menjadi salah satu acuan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Perencanaan yang disusun oleh pemerintah disusun berdasarkan peran dan fungsi serta kewenangan masing-masing bersama stakeholder terkait dengan mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan tersebut disusun dengan memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan antar dokumen perencanaan.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJM nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen perencanaan teknis bidang kesehatan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan kesehatan yang diuraikan dalam rencana program bidang kesehatan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam Renstra

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 tidak ada visi dan misi namun mengikuti visi dan misi Presiden yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.

Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 meliputi 12 (dua belas) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit;
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Meningkatnya Akses, Kemandirian dan mutu sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan;
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga;
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri;
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi;
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan;
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan;
12. Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi.

Adapun prioritas pembangunan kesehatan pada tahun 2020-2024 difokuskan pada enam fokus prioritas yaitu:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. Meningkatnya pengendalian penyakit;
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan Vaksin; serta
6. Meningkatkan responsivitas system kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan tetap mengacu pada dokumen Rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan juga menjadi rujukan dalam penyusunan jenis program dan kegiatan serta indikator yang akan dicapai terutama

untuk indikator program yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

a. Tujuan



Upaya perwujudan Misi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ditetapkan tujuan sebagai berikut :

“Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan mutu dan pelayanan sumber daya kesehatan pada tingkat dasar dan rujukan;
- b. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta wabah sejak dini dengan penguatan system surveilliance melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat;
- c. Peningkatan pencapaian derajat kesehatan melalui promosi kesehatan dan membangun kemitraan dengan lintas sektor.

b. Sasaran

SASARAN STRATEGIS

Untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan sasaran-sasaran strategis dengan indikator sasaran utama sebagai berikut:

Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat

1. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - 7) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - 8) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 9) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
 - 10) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
 - 11) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
 - 12) Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
 - 13) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
 - 14) Peningkatan Pelayanan BLUD

Melalui Program :

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
- 2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- 4) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- 5) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan

Kegiatan masing-masing dari seluruh program yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Peningkatan Pelayanan BLUD
- 2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
 - Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

- 4) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
 - Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
 - Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

- 5) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

Tabel 3.3 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur

KODE	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	TARGET	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
								TARGET	Pagu Indikatif	
DINAS KESEHATAN										118,980,530,000
										42,350,508,600
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provinsi Kaltim			APBD				42,350,508,600
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Kaltim			APBD				1,450,000,000
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	10	Dokumen	APBD		10	Dokumen	1,100,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kaltim	8	Laporan	APBD		8	Laporan	350,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi Kaltim			APBD				33,368,840,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kaltim	194	Orang/Bulan	APBD		194	Orang/Bulan	33,000,000,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Kaltim	12	Dokumen	APBD		12	Dokumen	318,840,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Kaltim	1	Laporan	APBD		1	Laporan	10,000,000
87										

		01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	10,000,000	APBD		1	Dokumen	10,000,000
		01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Provinsi Kaltim	1	Laporan	10,000,000	APBD		1	Laporan	10,000,000
		01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	20,000,000	APBD		1	Dokumen	20,000,000
		01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Provinsi Kaltim			407,653,000	APBD				407,653,000
		01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi Kaltim	1	Paket	157,653,000	APBD		1	Paket	157,653,000
		01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Kaltim	50	Orang	250,000,000	APBD		50	Orang	250,000,000
		01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Kaltim			2,994,015,600	APBD				2,994,015,600
		01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kaltim	1	Paket	40,000,000	APBD		1	Paket	40,000,000
		01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Kaltim	5	Paket	700,000,000	APBD		5	Paket	700,000,000
		01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi Kaltim	12	Paket	50,000,000	APBD		12	Paket	50,000,000
		01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi Kaltim	12	Dokumen	40,000,000	APBD		12	Dokumen	40,000,000
		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kaltim	12	Laporan	2,164,015,600	APBD		12	Laporan	2,164,015,600
		01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Provinsi Kaltim			500,000,000	APBD				500,000,000

		01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Provinsi Kaltim	2	Unit	500,000,000	APBD		2	Unit	500,000,000
		01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Kaltim			3,130,000,000	APBD				3,130,000,000
		01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kaltim	12	Laporan	20,000,000	APBD		12	Laporan	20,000,000
		01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Kaltim	12	Laporan	710,000,000	APBD		12	Laporan	710,000,000
		01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi Kaltim	12	Laporan	2,400,000,000	APBD		12	Laporan	2,400,000,000
		01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Kaltim			500,000,000	APBD				500,000,000
		01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi Kaltim	25	Unit	175,000,000	APBD		25	Unit	175,000,000
		01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kaltim	1	Unit	150,000,000	APBD		1	Unit	150,000,000
		01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Kaltim	1	Unit	175,000,000	APBD		1	Unit	175,000,000
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Provinsi Kaltim				APBD				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Provinsi Kaltim			75,608,951,400	APBD				75,608,951,400

1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Provinsi Kaltim			592,930,000	APBD				592,930,000
					Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. dll) yang Dilakukan Pengembangan dll)	Provinsi Kaltim	1	Layanan	92,120,000	APBD		1	Layanan	92,120,000
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Provinsi Kaltim	25	Unit	9,090,000	APBD		25	Unit	9,090,000
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Provinsi Kaltim	2	Dokumen	368,000,000	APBD		2	Dokumen	368,000,000
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Provinsi Kaltim	10	Paket	123,720,000	APBD		10	Paket	123,720,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Provinsi Kaltim			74,522,421,400	APBD				74,522,421,400
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Provinsi Kaltim		Orang	157,267,000	APBD			Orang	157,267,000

1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Provinsi Kaltim	75	Orang	194,467,000	APBD		75	Orang	194,467,000
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Provinsi Kaltim	2	Dokumen	364,098,000	APBD		2	Dokumen	364,098,000
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	10,000,000	APBD		1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	10,000,000	APBD		1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	5,364,000,000	APBD		1	Dokumen	5,364,000,000
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	264,000,000	APBD		1	Dokumen	264,000,000
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	264,000,000	APBD		1	Dokumen	264,000,000
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	10,000,000	APBD		1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	320,000,400	APBD		1	Dokumen	320,000,400
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Provinsi Kaltim	2	Dokumen	691,123,000	APBD		2	Dokumen	691,123,000
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	188,800,000	APBD		1	Dokumen	188,800,000
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	10,000,000	APBD		1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	65,300,000,000	APBD		1	Dokumen	65,300,000,000

1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	10,000,000	APBD		1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	300,000,000	APBD		1	Dokumen	300,000,000
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	2	Dokumen	282,568,000	APBD		2	Dokumen	282,568,000
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Provinsi Kaltim	2	Dokumen	217,432,000	APBD		2	Dokumen	217,432,000
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Provinsi Kaltim	8	Dokumen	67,200,000	APBD		8	Dokumen	67,200,000
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia. Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Provinsi Kaltim	5	Unit	45,690,000	APBD		5	Unit	45,690,000
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Provinsi Kaltim	12	Paket	21,066,000	APBD		12	Paket	21,066,000
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	10,000,000	APBD		1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	420,710,000	APBD		1	Dokumen	420,710,000
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Provinsi Kaltim			450,000,000	APBD				450,000,000
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Provinsi Kaltim	3	Dokumen	450,000,000	APBD		3	Dokumen	450,000,000

1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Provinsi Kaltim			43,600,000	APBD				43,600,000
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Provinsi Kaltim	1	Unit	33,600,000	APBD		1	Unit	33,600,000
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Provinsi Kaltim	6	Unit	10,000,000	APBD		6	Unit	10,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Provinsi Kaltim			558,558,000	APBD				558,558,000
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Provinsi Kaltim			558,558,000	APBD				558,558,000
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Provinsi Kaltim	400	Orang	511,418,000	APBD		400	Orang	511,418,000
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	47,140,000	APBD		1	Dokumen	47,140,000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Provinsi Kaltim			178,512,000	APBD				178,512,000
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Provinsi Kaltim			167,416,000	APBD				167,416,000

1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Perizinan	Provinsi Kaltim	30	Sarana	157,416,000	APBD		30	Sarana	157,416,000
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Provinsi Kaltim	2	Dokumen	10,000,000	APBD		2	Dokumen	10,000,000
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Provinsi Kaltim			11,096,000	APBD				11,096,000
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Provinsi Kaltim	2	Sarana	11,096,000	APBD		2	Sarana	11,096,000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Provinsi Kaltim			284,000,000	APBD				284,000,000
1	02	05	1.01		Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Provinsi Kaltim			10,000,000	APBD				10,000,000
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	10,000,000	APBD		1	Dokumen	10,000,000
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Provinsi Kaltim			171,400,000	APBD				171,400,000

1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	161,400,000	APBD		1	Dokumen	161,400,000
1	02	05	1.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	10,000,000	APBD		1	Dokumen	10,000,000
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah		Provinsi Kaltim			102,600,000	APBD				102,600,000
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Provinsi Kaltim	1	Dokumen	102,600,000	APBD		1	Dokumen	102,600,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2023, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2023, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2023. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2023.

4.1 Pagu Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kode	Organisasi	RKPD 2023 (Rp)
1.02.01	Dinas Kesehatan	Rp. 151.180.530.000,-
1.02.01.01	Dinas Kesehatan	Rp. 118.980.530.000,-
1.02.01.02	UPTD Balai Latihan Kesehatan	Rp. 3.000.000.000,-
1.02.01.02	UPTD Rumah Sakit Mata	Rp. 8.900.000.000,-
1.02.01.03	UPTD Laboratorium Kesehatan	Rp. 8.500.000.000,-
1.02.01.04	UPTD Rumah Sakit Daerah KORPRI	Rp. 11.800.000.000,-

4.2 Program Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SILPA pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dituangkan pada tabel dibawah ini :

URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	Catatan Penting
	BIDANG URUSAN/BIDANG-UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					
DINAS KESEHATAN									118,980,530,000
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				42,350,508,600
		01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,450,000,000
		01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	1,100,000,000
		01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	350,000,000
		01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				33,368,840,000
		01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194	Orang/Bulan	33,000,000,000
		01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	318,840,000
		01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10,000,000
		01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	10,000,000
		01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	10,000,000
		01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	20,000,000
		01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				407,653,000
		01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	157,653,000
		01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	250,000,000
		01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,994,015,600
		01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	40,000,000
		01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	700,000,000

		01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	50,000,000
		01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	40,000,000
		01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	2,164,015,600
		01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500,000,000
		01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	Unit	500,000,000
		01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,130,000,000
		01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	20,000,000
		01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	710,000,000
		01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	2,400,000,000
		01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				500,000,000
		01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	175,000,000
		01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	150,000,000
		01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	175,000,000
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				75,608,951,400
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				592,930,000
					Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. dll) yang Dilakukan Pengembangan	1	Layanan	92,120,000

1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan Layanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	25	Unit	9,090,000
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Dokumen	368,000,000
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat. Vaksin. Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	10	Paket	123,720,000
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				74,522,421,400
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	833,578	Orang	157,267,000
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75	Orang	194,467,000
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2	Dokumen	364,098,000
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen	5,364,000,000
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	264,000,000
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	264,000,000
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	320,000,400
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	Dokumen	691,123,000
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	Dokumen	188,800,000
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	Dokumen	10,000,000

1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	65,300,000,000
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300,000,000
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	2	Dokumen	282,568,000
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	2	Dokumen	217,432,000
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	8	Dokumen	67,200,000
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	Unit	45,690,000
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12	Paket	21,066,000
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	10,000,000
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	420,710,000
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				450,000,000
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	Dokumen	450,000,000
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				43,600,000
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	Unit	33,600,000
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	6	Unit	10,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				558,558,000
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				558,558,000

1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400	Orang	511,418,000
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	47,140,000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				178,512,000
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				167,416,000
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	30	Sarana	157,416,000
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	2	Dokumen	10,000,000
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				11,096,000
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	2	Sarana	11,096,000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				284,000,000
1	02	05	1.01		Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				10,000,000
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	10,000,000
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				171,400,000
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	161,400,000
1	02	05	1.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Dokumen	10,000,000
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				102,600,000
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	102,600,000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 mencakup tiga bahasan yaitu:

A. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang.

B. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholder), tetap harus dikedepankan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrument pengendalian yang berfungsi mengevaluasi

kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan anggaran tahun 2023.

Samarinda, 14 Maret 2022

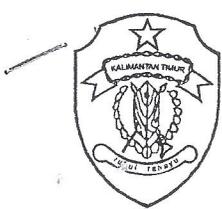


KEPALA DINAS KESEHAAN

Setiawan, SKM, MQIH

Manajemen Kesehatan Tingkat I

NIP. 19690129 199302 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Abdul Wahab Syahrani No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. (0541) 743810
website: www.kesehatan.kaltimprov.go.id *email:* dinkeskaltim16@gmail.com
SAMARINDA 75124



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 050/ 2025 /Sekretariat/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) MURNI DAN PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
 2. bahwa untuk membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Murni dan Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ;
 3. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Renstra Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim tentang Pembentukan **Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Murni dan Perubahan** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai **Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Murni dan Perubahan** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

- Kedua** : **Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Murni dan Perubahan** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 bertugas menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 dan menghimpun semua data pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
- Ketiga** : Dalam pelaksanaannya **Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Murni dan Perubahan** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 harus senantiasa berpedoman pada peraturan dan dasar hukum yang berlaku serta senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan.
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2022.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Kesehatan,



Masitali, SKM, MQIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690129 199302 2 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim tentang Pembentukan **Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023** Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Tanggal : 03 Januari 2022

Nomor : 050/205 /Sekretariat/I/2022

**Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Murni dan Perubahan
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023**

No	Nama	Jabatan
1	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
3	Kasubbag Perencanaan Program	Sekretaris
4	Kabid. SDK	Anggota
5	Kabid. Kesmas	Anggota
6	Kabid. P2P	Anggota
7	Kabid. Yankes	Anggota
8	Kasie Kefarmasian	Anggota
9	Kasie Alat Kesehatan & PKRT	Anggota
10	Kasie SDM Kesehatan	Anggota
11	Kasie Kesehatan Keluarga	Anggota
12	Kasie Gizi, Kesehatan Kerja & Olahraga	Anggota
13	Kasie Promosi, Pemberdayaan Kesehatan & Kesehatan Lingkungan	Anggota
14	Kasie Surveilans & Imunisasi	Anggota
15	Kasie Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
16	Kasie Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Anggota
17	Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
18	Kasie Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
19	Kasie Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
20	Erni Rakhmi, SKM	Anggota
21	Iberahim Noor, SKM	Anggota
22	Putri Rahmayani	Anggota
23	Andi Nurul Rifqah Utami, SKM	Anggota
24	Sularmi	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Kesehatan,


Masitah SKM, MQIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19690129 199302 2 002